

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bali Democracy Forum (BDF) berfungsi sebagai sarana untuk mendukung demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Inisiatif yang dimulai oleh SBY pada tahun 2008 dan diteruskan oleh Jokowi dari 2015 hingga kini, merupakan pertemuan tahunan antar negara yang inklusif dan terbuka untuk membahas kemajuan demokrasi di wilayah Asia Pasifik. Tujuan dari forum ini adalah untuk mempromosikan serta mendorong kolaborasi regional dan global di bidang perdamaian dan demokrasi melalui diskusi yang berbasis pada pertukaran pengalaman dan praktik terbaik yang mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, dan pemahaman, serta berbagi tanggung jawab dengan negara-negara peserta. Dalam perspektif Indonesia, demokrasi lebih dari sekadar pelaksanaan pemilihan umum yang baik. Demokrasi harus diperkuat dan terintegrasi dalam setiap dimensi kehidupan nasional Indonesia. Lebih lanjut, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi sebagai dasar falsafah bangsa harus tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Oleh karena itu, advokasi demokrasi menjadi komponen penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama di wilayah Asia. Dalam BDF, Indonesia menyoroti signifikansi dasar dari cara pembangunan demokrasi di daerah ini yang didasarkan pada prinsip utama berikut: (i) Demokrasi tidak bisa dipaksakan dari luar. Setiap kemajuan politik hendaknya merupakan pengalaman yang berasal dari

masyarakat lokal. Ini adalah sesuatu yang perlu dibangun atas dasar sejarah dan konteks budaya suatu negara. (ii) Sangat penting bagi komunitas bangsa di seluruh dunia, tanpa memandang kesamaan ideologi dan loyalitas politik mereka, untuk saling belajar demi meningkatkan cara pemerintahan agar dapat mencapai tujuan kemakmuran dan perdamaian yang lebih baik. Proses belajar satu sama lain dan berbagi pengetahuan akan semakin menguatkan karakter demokrasi sebagai elemen penyatu. Indonesia meyakini bahwa demokrasi adalah faktor penting dalam menggalakkan perdamaian dan kestabilan di wilayah tersebut. Banyak negara di kawasan ini yang mengakui universalitas nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut, dapat berkontribusi untuk menguatkan perdamaian, kestabilan, dan kemakmuran di kawasan.

Dengan ciri-ciri yang seperti itu, BDF berfungsi sebagai platform strategis yang krusial untuk memajukan demokrasi dan perdamaian (demokrasi yang damai). Terdapat bukti bahwa negara-negara peserta forum menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Jumlah peserta BDF tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008, BDF hanya diikuti oleh 40 negara, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 123 negara pada tahun 2020 dari hampir semua wilayah di dunia.

Mengapa BDF mampu bertahan dan menjadi agenda tahunan banyak negara? Salah satu elemen kuncinya adalah pendekatan inklusif yang unik dari BDF: Indonesia tidak membatasi partisipasi dalam forum hanya untuk negara-negara yang dianggap sah sebagai demokrasi, tetapi juga mencakup negara-negara

yang sesungguhnya merupakan rezim otoriter, baik militer maupun sipil, totaliter, monarki absolut, teokrasi, atau sistem satu partai. Dengan pendekatan inklusif yang menjadi ciri khas Indonesia ini, para peserta tidak dikesampingkan dan merasa nyaman dalam berpartisipasi dalam diskusi mengenai demokrasi serta berbagi pengalaman tentang praktik terbaik di bidang demokrasi. Pendekatan inklusif yang diterapkan oleh BDF dengan cara langsung maupun tidak langsung menunjukkan pengakuan dari Indonesia bahwa tidak ada satu model yang universal dan bentuk ideal demokrasi. Walaupun setiap negara demokrasi pasti mengadopsi prinsip dasar demokrasi, namun setiap negara harus memiliki karakteristik unik yang tidak dapat dengan mudah diterapkan—apalagi dipaksakan—kepada negara-negara lain. Oleh karena itu, demokrasi seharusnya berkembang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar.¹

Sementara Institute for Peace and Democracy (IPD) — yang juga didirikan pada tahun 2008 — bertujuan untuk mendukung visi BDF dengan mengintegrasikan konsep serta keterampilan terkait perdamaian dan demokrasi (demokrasi perdamaian) melalui pertukaran pengetahuan, memberikan pelatihan kepada para praktisi, melaksanakan misi bersama, membangun jaringan, menerbitkan materi, dan mendorong kemajuan dalam demokrasi. Menyadari pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan demokrasi dan bagaimana peran BDF semakin diakui dalam skala global, Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan dan memperluas pemahaman serta tujuan BDF ke berbagai belahan dunia. Memang, Indonesia merupakan penggagas BDF. Indonesia

¹ Lihat Azyumardi Azra, *BDF dan Demokrasi Indonesia*, 2012, <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/06/06122651/BDF.dan.Demokrasi.Indonesia?page=all> (diakses tanggal 2 Februari 2021).

menjadi pusat demokrasi regional yang sering menjadi rujukan oleh banyak negara dan lembaga internasional. Namun, komitmen Indonesia dalam memajukan demokrasi juga terlihat melalui upaya mengembangkan forum-forum demokrasi di berbagai wilayah lain di dunia.

Pada tanggal 2 Oktober 2017, pemerintahan Jokowi berkolaborasi dengan Tunisia untuk menyelenggarakan BDF Chapter Tunisia yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Tunisia Khemaies Jhinaoui. Ini menjadi yang pertama dalam sejarah BDF dengan forum yang penuh semangat dan berakar pada BDF yang berkembang dan dilaksanakan di luar tanah air. Acara ini dihadiri oleh berbagai negara dari wilayah Afrika Utara. Di sisi lain, pada 14 September 2018, Indonesia dan Jerman juga menggelar BDF Chapter Berlin, yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas. Forum ini juga dihadiri oleh negara-negara dari kawasan tersebut.

Menyadari karakter inklusif BDF, tidak mengherankan jika semua negara yang terlibat – terutama negara yang tidak memiliki sistem demokrasi – bersedia turut serta membahas masalah yang sangat sensitif, yaitu demokrasi. Myanmar merupakan contoh yang baik dari negara non demokratis yang merasakan pentingnya peranan BDF. Sejak penyelenggaraan pertama BDF pada tahun 2008, Myanmar telah secara konsisten berpartisipasi dalam forum tersebut. Bahkan, Myanmar sendiri meminta kepada BDF dan organisasi pendukungnya, yaitu IPD, untuk memberikan bantuan kepada negara junta militer tersebut untuk keluar dari

stagnasi politik yang diakibatkan oleh penerapan sistem yang tidak demokratis dan otoriter.

Secara bertahap, BDF mulai memberikan dampak pada proses demokrasi yang berlangsung di Myanmar. Dengan dukungan dari Institute for Peace and Democracy (IPD), sebagai lembaga yang menjalankan BDF, pemerintah Indonesia mengalokasikan berbagai bentuk bantuan untuk memperkuat kapasitas dalam bidang demokrasi, seperti program pemantauan dan kunjungan pemilu, serta diskusi mengenai desentralisasi, demokrasi, dan pembangunan perdamaian. Aktivitas ini tentunya menciptakan perubahan yang positif bagi Myanmar dalam upaya pengembangan demokrasinya.

Secara singkat, partisipasi aktif Myanmar dalam BDF, pada akhirnya, dapat mengubah cara pandang terhadap identitas negara yang dikelola oleh militer tersebut, dari yang otoriter menjadi lebih demokratis. Perubahan identitas ini berpengaruh pada relasi Myanmar dengan negara-negara lainnya, khususnya negara-negara Barat, serta memperbaiki proses rekonsiliasi dengan negara-negara Barat yang selama ini memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Selain itu, pengaruh lain yang ditimbulkan oleh BDF adalah munculnya kesadaran di kalangan elit politik dan rezim militer di Myanmar mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai demokrasi. Ini terlihat dari keinginan Myanmar untuk berkolaborasi dengan IPD dalam mendukung proses transisi ke demokrasi di negara tersebut.

Salah satu pencapaian lain dari BDF adalah ketika lembaga pendukungnya (IPD) berhasil menarik dukungan dari banyak negara yang siap terlibat dalam

mendorong demokrasi di Myanmar. IPD pernah bekerja sama dengan Norwegia dan Australia untuk menyelenggarakan lokakarya serta mengundang Myanmar guna membahas berbagai strategi dalam proses transisi menuju demokrasi. Munculnya tanggapan positif yang disusul oleh kecenderungan Norwegia dan Australia untuk berkolaborasi dengan IPD dalam mendukung transisi demokrasi Myanmar menunjukkan kepercayaan kedua negara terhadap perbaikan demokrasi di Myanmar.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, indeks demokrasi di Myanmar yang dicatat oleh Freedom House menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dari 21 menjadi 24 poin antara tahun 2012 dan 2014. Temuan penelitian yang dirilis oleh Freedom House tersebut menunjukkan beberapa kemajuan di aspek politik dan hak sipil seperti pemilihan umum dan kebebasan sipil, yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 5 dan 6 poin. Dengan menganalisis kasus transisi demokrasi di Myanmar, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mempromosikan demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia demi mencapai perdamaian demokrasi dapat dianggap berhasil.

Namun dalam kaitannya dengan pemanfaatan BDF bagi kepentingan nasional Indonesia dapat terbilang belum optimal. Oleh karenanya ada tiga saran penting yang mungkin perlu diperhatikan secara serius oleh para pembuat kebijakan di negeri ini agar BDF menjadi bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.²

² Ketiga saran penting dalam penutup ini saya adopsi dari tulisan Ignas Kleden, *Insight: Bali Democracy Forum: Whose Event Is It?*, 2012, <https://www.thejakartapost.com/news/2012/11/08/insight-bali-democracy-forum-whose-event-it.html>. Ini, hemat saya, penting untuk dijadikan catatan pemerintahan Indonesia ke depannya.

Pertama, pelaksanaan BDF seharusnya merujuk pada karakteristik nasional Indonesia, yang dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di seluruh dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Meskipun berada di posisi ketiga, namun Indonesia memiliki keunggulan yang lebih mencolok serta daya tarik yang lebih unik, mengingat bahwa negara ini merupakan tempat dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Ini penting untuk dicatat karena bukanlah hal yang sederhana untuk mengintegrasikan pemahaman demokrasi yang sering kali dianggap berasal dari Barat dengan prinsip-prinsip Islam. Sampai hari ini, kerukunan dan keanekaragaman di Indonesia tetap terjalin dengan baik meskipun telah berusia 71 tahun sejak Proklamasi. Keistimewaan Indonesia terletak pada kenyamanan dan ketenteraman yang dinikmati oleh 271.349.889 penduduknya. Perbedaan yang ada dalam hal agama, suku, golongan, bahasa, budaya, dan tradisi merupakan elemen yang memperkaya warisan budaya bangsa. Kemerdekaan Republik Indonesia, mengacu pada istilah yang dikemukakan oleh Benedict Anderson, seorang pakar Indonesia, dapat dipahami sebagai hasil dari *imagined community* atau komunitas yang dibayangkan. Meskipun terdapat perbedaan dalam warna kulit dan bahasa, warga RI di Papua melihat warga RI di Aceh, Jakarta, Makassar, dan daerah-daerah lain sebagai keluarga. Ada rasa kebersamaan dalam suka dan duka serta niat untuk hidup berdampingan yang menyatukan mereka satu sama lain.

Namun, Indonesia harus ingat bahwa negara ini masih sangat rentan terhadap perpecahan. Analisis mengenai faktor geografis Indonesia menunjukkan bahwa pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan dan bentang alam yang sangat

luas, mulai dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote, berpotensi membuat pencapaian persatuan dan kesatuan menjadi lebih sulit. Hal ini juga berlaku untuk analisis demografis. Keragaman dalam struktur bangsa menyebabkan setiap permasalahan SARA yang muncul dapat mengganggu keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Namun, hal ini dapat dihindari jika ada komitmen yang kuat terhadap empat konsensus bangsa yang berfungsi sebagai pengikat dan jembatan bagi semua perbedaan yang ada. Dalam konteks BDF, disarankan agar Pemerintah Indonesia menjadikan atribut nasional yang menjadi kekuatan utama Indonesia sebagai dasar dalam melakukan diplomasi. Isu-isu yang berkaitan dengan agama, demokrasi, dan pluralisme yang pernah dibahas dalam BDF seharusnya dikembangkan dari lingkup strategis terdekat, yaitu kawasan Asia Tenggara, hingga pada tataran lingkungan strategis global yang menjadi kepentingan nasional utama Indonesia.

Pemerintah dapat mengambil inisiatif mengenai masalah kerukunan antaragama di Asia Tenggara yang kini menjadi perhatian utama. Isu diskriminasi dan genosida yang menimpa etnis Rohingya perlu diangkat ke permukaan. Sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin di kawasan, Indonesia seharusnya memimpin dalam menciptakan sikap terhadap Myanmar. Kejadian yang berlangsung di Myanmar bukan hanya sekedar urusan dalam negeri, melainkan juga telah berkembang menjadi isu yang mengganggu kawasan Asia Tenggara. Situasi ini bahkan berpotensi menjelma menjadi masalah global terkait dengan migrasi massal etnis Rohingya ke berbagai negara sebagai dampak dari

kegagalan pemerintah Myanmar dalam menjaga keselamatan dan keamanan warganya.

Dalam konteks strategis yang lebih luas, terutama di Asia Pasifik, Indonesia dapat mendorong pengembangan dan penguatan wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua, sebagai contoh sistem pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Dengan jujur, isu separatisme menjadi fokus utama bagi negara-negara dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang secara sosiokultural memiliki hubungan erat dengan Papua. Keberhasilan dalam pembangunan di Papua bisa membantu mengurangi citra negatif terhadap Indonesia dan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan dalam proses pembangunan.

Kedua, dalam perspektif internasional, pemerintahan mesti bisa meyakinkan peserta BDF bahwa Indonesia sepenuhnya berkomitmen dalam upaya melawan terorisme dan radikalisasi secara global. Republik Indonesia seharusnya menjadi teladan bagi negara-negara Islam lainnya serta menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa perdamaian bagi seluruh alam. Di negara ini tidak ada dominasi dari mayoritas yang mengisolasi minoritas, begitupun tidak ada penindasan dari minoritas terhadap mayoritas. Elemen kesejahteraan dan keadilan dalam akses terhadap hasil pembangunan juga merupakan faktor utama untuk mengurangi potensi terorisme dan radikalisasi di Indonesia.

Ketiga, selain pendekatan outward looking yang telah disebutkan, pemerintah juga harus menjadikan BDF sebagai platform untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Inti dari demokrasi adalah

menciptakan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, masyarakat memiliki apa yang disebut dengan 'daulat rakyat'. Penyusunan pemerintahan seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus mencerminkan budaya bangsa agar amanah yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dapat diwujudkan secara maksimal. Melalui BDF, pemerintah Indonesia dapat berbagi praktik terbaik dengan negara lain, terutama dalam hal bagaimana struktur demokrasi seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berfungsi secara efektif, tanpa mengabaikan harmoni dan mekanisme check and balances yang berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia juga dapat meminta rekomendasi dan masukan dari negara lain tentang pengelolaan masyarakat sipil yang efektif. Dengan demikian, keberadaan masyarakat sipil di Indonesia dapat mendukung dan menyeimbangkan penerapan agenda-agenda demokrasi pemerintah. Maya kita semua sebagai rakyat Indonesia tentunya berharap agar event BDF ini dapat terus dilanjutkan dan berjalan dengan baik serta lancar.

Semoga perhelatan BDF ini tidak hanya menjadi medium promosi demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia mewujudkan perdamaian demokrasi, melainkan juga dapat menjadi medium promosi bagi Pemerintah Indonesia mengenai kehidupan berdemokrasi di Tanah Air. Dengan begitu, upaya untuk mengangkat pengaruh dan kepemimpinan Indonesia, baik pada level regional maupun global bisa dilakukan dengan lebih mudah dan sasaran-sasaran kepentingan nasional Indonesia dapat diraih.

B. Implikasi Teoretis

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip BDF yang menekankan pada *home-grown democracy* rupanya bersejalan dengan teori perdamaian monadik (*monadic peace theory*), varian dari teori perdamaian demokratis (*democratic peace theory*). Dengan menjadikan teori monadik sebagai nilai-nilai dalam promosi demokrasi, BDF secara praktik bisa dikonstruksi (konstruktivisme) oleh para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia bersifat inklusif. Sebab demokrasi hanya bisa berhasil ketika demokrasi bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi pada proses demokrasi. Melalui prinsip tersebut, Indonesia menjadi lebih terbuka kepada semua negara yang ingin ikut andil dalam perhelatan BDF, baik kepada negara demokrasi atau pun negara yang berciri non-demokrasi.

